

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang tentang analisis pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di pelabuhan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan pendistribusian kondom tidak menjangkau seluruh wilayah pekerja pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Lebih dari setengah pekerja (65,5%) responden belum mendapatkan kondom dan dua outlet di Pelabuhan Teluk Bayur tidak mampu mendistribusikan secara merata kepada seluruh pekerja dipelabuhan.
2. Pemberian Layanan IMS dan HIV pada Pelaksanaan Program Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HA) di Pelabuhan Teluk Bayur belum menjangkau semua pekerja. Untuk meningkatkan jumlah capaian rujukan program layanan IMS HIV dilakukan dengan VCT Mobile. Dari 41,8% responden yang pernah melakukan tes IMS HIV, 76,1% nya periksa IMS HIV melalui *VCT Mobile*. Sedangkan sisanya 58,2 % belum mendapatkan layanan IMS HIV sama sekali. Lebih dari setengah responden menilai pemberian layanan IMS HIV belum efektif. Kesadaran pekerja untuk tes IMS dan HIV masih sangat rendah, bukan atas kesadaran sendiri melainkan karena arahan atau anjuran dari pimpinan.
3. Komunikasi dan sosialisai pada Pelaksanaan Program Pencegahan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HA) di Pelabuhan Teluk Bayur belum maksimal. Dari (76,4%) pekerja pelabuhan yang pernah mendapatkan sosialisasi mengenai HIV AIDS, 54,8% mendapatkan sosialisasi di luar pelabuhan dan 23,6 % belum pernah mendapatkan sosialisasi. Dari 37,2% pekerja yang telah menerima sosialisasi pada pelaksanaan program menilai juga terjadi lost follow up yang mengakibatkan nilai besaran pekerja yang mendapatkan komunikasi efektif dan berkelanjutan menjadi lebih kecil. Salah satu penyebab belum sampainya informasi tentang HIV/AIDS kepada pekerja adalah Kinerja *Peer Educator* (PE) atau kader belum maksimal, dan masih tergantung dengan petugas KPA Kota Padang.
4. Implementasi Program Pencegahan Penanggulangan HIV/ AIDS (P2HA) di Pelabuhan Teluk Bayur masih mengalami bentuk kerjasama yang simpang siur baik

itu antara pelaksana program, pihak perusahaan, dan KPA Kota Padang terutama dalam pelaksanaan program yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 dikeluarkan regulasi tertulis melalui Surat Keputusan Kepala KSOP Teluk Bayur Kota Padang untuk membentuk Panitia pelaksana Pokja HIV di pelabuhan yang anggotanya berasal dari pihak pelabuhan yang sampai sekarang masih sangat bergantung kepada KPA kota Padang. Berdasarkan dari hasil survey kepada pekerja di pelabuhan, 32,7% berhubungan seks berisiko dengan WPS, 22,7% dengan pacar atau teman, dan sekitar 56% tidak menggunakan kondom dalam berhubungan seks berisiko. Kesadaran pekerja akan perilaku berisikonya masih kurang, padahal 76,4% sudah mendapatkan informasi atau sosialisasi karena belum efektifnya implementasi sosialisasi yang telah dilakukan tersebut.

## **B. Saran**

1. Menambah jumlah outlet yang bisa diakses oleh seluruh pekerja laki-laki berisiko di Pelabuhan teluk Bayur. Peningkatan dan penambahan kuantitas outlet kondom ini, salah satunya pada tiap instansi atau perusahaan di Pelabuhan.
2. Meningkatkan koordinasi *VCT mobile* dengan instansi atau perusahaan di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang melalui atasan pekerja masalah waktu pelaksanaan layanan sehingga layanan *VCT mobile* melakukan tes IMS dan HIV merupakan salah satu bagian layanan dari perusahaan dan wajib diikuti oleh setiap pekerja.
3. Mengaktifkan fungsi *Peer Educator* (PE) atau kader agar dapat memberikan informasi secara komprehensif kepada pekerja dan komunitas kunci di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang secara mandiri tanpa harus di dampingi oleh petugas KPA Kota Padang dengan adanya pelatihan *public speaking*. Adanya media KIE yang menarik dalam bentuk kartu remi. Laki-laki yang sebagian besar memanfaatkan waktu senggang dari pekerja saat menunggu proses *loading*, di mana pada kartu remi di lembar baliknya berisi pesan mengenai HIV dan AIDS, sehingga ini lebih berguna dibandingkan dengan model leaflet, karena leaflet sebagian besar akan dibuang dan tidak disimpan.
4. Menjadikan program HIV/AIDS sebagai prioritas yang didukung oleh berbagai instansi baik perusahaan, KPA, layanan kesehatan atau pemerintah. Selain itu, dibantu dengan kontrol pengawasan dan laporan tugas lebih dimaksimalkan oleh penanggungjawab program ini.

